

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 1750-1850 merupakan periode bersejarah penting bagi dunia dimana terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, teknologi, dan manufaktur yang disebut periode revolusi industri. Revolusi industri adalah pergeseran fungsi tenaga kerja menjadi mesin-mesin industri yang berbasis manufaktur. Salah satu dampak adanya revolusi industri adalah semakin tingginya pencemaran lingkungan terkhusus tingkat emisi karbon dioksida. Batas aman emisi karbon di bumi adalah 350 ppm, sedangkan Observatorium Mauna Loa di Hawaii mencatat bahwa konsentrasi karbon dioksida (CO₂) tahun 2019 telah melewati ambang batas iklim untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, yaitu mencapai 415 ppm (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2019).

Kondisi ini salah satunya disebabkan aktivitas industri yang dijalankan oleh pelaku ekonomi yaitu perusahaan, dimana memicu Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang cukup besar (Prafitri dan Zulaikha, 2016). Berdasarkan *World Meteorological Organization* (WMO), pemanasan global menjadi isu yang harus diperhatikan karena semakin tahun tingkat emisi karbon, khususnya gas CO₂ terus mengalami peningkatan (Sari, 2017). Hal ini menyadarkan masyarakat dunia mengenai keberlanjutan pertumbuhan pembangunan tidak akan tercapai apabila yang dikejar hanyalah pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Perubahan iklim dan pemanasan global secara tidak langsung akan menyebabkan terganggunya hal-hal yang berhubungan dengan rantai nilai (*value chain*). Hal ini akan berdampak bagi perusahaan karena rantai nilai merupakan salah satu pendukung kelangsungan hidup dan keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terbentuk sebuah gagasan bagi era perekonomian baru yang tertuang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*) yaitu kesepakatan yang merupakan komitmen politik internasional dan ditandatangani di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Tujuan dari gagasan

tersebut yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dimana kebutuhan generasi yang ada di masa sekarang dapat terpenuhi tanpa harus mengganggu pemenuhan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang. Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ke-3 yang dilaksanakan di Kyoto, Jepang, lahir suatu kesepakatan internasional yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Selanjutnya, kesepakatan ini diadopsi oleh Indonesia sebagai upaya dalam mengurangi emisi GRK (*World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia, 2018).

Di Indonesia sendiri, fenomena ini ditanggapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2004 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 tahun 2011 tentang penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Menurut pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011, menjelaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya perusahaan. Sebagai pelaku usaha, bentuk usaha dalam menurunkan emisi GRK yang diterapkan perusahaan dapat diinformasikan kepada *stakeholder* melalui pengungkapan emisi karbon. Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2004 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ciri khas memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan mempunyai penduduk dengan jumlah besar, sangat berpotensi tinggi terkena terhadap dampak perubahan iklim. Seiring dengan bertumbuhnya industri di Indonesia yang juga didorong oleh revolusi industri 4.0, hal ini akan menyebabkan Indonesia mengalami peningkatan konsentrasi emisi karbon. Indonesia merupakan salah satu negara dengan emisi karbon tertinggi di dunia dan berada di posisi ke-6. Indonesia bertanggung jawab atas konsentrasi emisi karbon per kapita: 6,76 tCO₂ atau sebanding 1.981 MtCO_{2e} (Dickson, 2018) sehingga perlu memperhatikan dan mengambil tindakan atas isu emisi karbon.

Dalam upaya mengurangi emisi karbon, perusahaan Indonesia didorong untuk memperhatikan konsep 3P yaitu *Planet, People, and Profit* (*Triple Bottom Line*) yang merupakan suatu kosep mengenai bisnis berkelanjutan (*sustainable business*) dengan mengutamakan kelestarian alam (*planet*), kesejahteraan manusia (*people*), dan perolehan laba (*profit*) dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan (Aras

dan Crowther, 2013). Aktivitas ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh *profit* menjadi salah satu pemicu terjadinya pemanasan global (Ja'far dan Kartikasari, 2009). Banyak perusahaan seringkali tidak memberikan informasi yang jelas terkait upaya dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan tetapi tetap menyatakan bahwa produk yang dihasilkan ramah lingkungan. Perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholdernya* dengan melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan tidak bisa hanya mementingkan upaya perolehan laba setinggi-tingginya. Pemahaman ini juga sejalan dengan teori *stakeholder*, yang menyatakan bahwa pelaku bisnis harus mengutamakan aktivitas usaha yang berfokus pada kepentingan *stakeholdernya* (Cahya, 2016).

Aktivitas perusahaan dapat menghasilkan emisi karbon dioksida yang cukup besar. Emisi karbon merupakan proses dimana karbon dioksida terlepas di atmosfer dan dapat disebabkan oleh banyak hal seperti pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, gas rumah kaca, dan kegiatan industri. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dipandang perlu menyatakan kegiatan terkait dengan lingkungan melalui pengungkapan. Dalam Perpres No. 61 Tahun 2011, menyatakan bahwa perusahaan juga berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dengan melakukan pengungkapan emisi karbon sebagai alternatifnya. Pengungkapan merupakan salah satu sarana dalam menjembatani perusahaan dengan masyarakat (Gray, Kouhy dan Lavers, 1995). Jika perusahaan telah menjalankan usahanya dan tidak menyalahi norma dan regulasi yang ditetapkan, maka masyarakat akan cenderung memberikan citra positif terhadap perusahaan tersebut (Deegan dan Unerman, 2006:12).

Perusahaan melakukan banyak sekali aktivitas usaha dan informasi terkait aktivitas ini diungkapkan melalui laporan tahunan. Sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa informasi perusahaan yang diperhatikan tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, melainkan seluruh aktivitas lain terkait kelangsungan hidup perusahaan, maka dari itu laporan tahunan dianggap sangat penting bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi untuk *stakeholdernya* (Freeman, 2010:12). Perusahaan dapat mengambil berbagai sarana dalam menginformasikan aktivitas mengenai kelangsungan hidup perusahaan, salah satunya

adalah melalui pengungkapan terkait tanggung jawab lingkungan. Pengungkapan mengenai tanggung jawab lingkungan diantaranya yaitu pengungkapan emisi karbon perusahaan (Cahya, 2016). Pengungkapan emisi karbon termasuk dalam pengungkapan sukarela dan belum ada standar akuntansi yang mengatur terkait emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon dilakukan dengan harapan *stakeholder* memberikan tanggapan baik karena perusahaan dianggap mengungkapkan informasi secara lengkap. Beberapa faktor yang mempengaruhi emisi karbon yang diungkapkan perusahaan diantaranya: kinerja lingkungan, profitabilitas, *media exposure*, kepemilikan institusional, tipe industri, *leverage*, ukuran perusahaan, serta kualitas audit (Prasetya dan Yulianto, 2018; Irwhantoko dan Basuki, 2016; Cahya, 2016; Pratiwi, 2017; Suhardi dan Purwanto, 2015).

Faktor pertama adalah kinerja lingkungan yaitu hasil yang dapat ditinjau berdasarkan aktivitas pengelolaan lingkungan dan dilakukan selaras dengan aktivitas pengendalian dari aspek-aspek lingkungan, dimana kinerja lingkungan diukur berdasarkan kebijakan lingkungan, target lingkungan, dan sasaran lingkungan (*International Organization for Standardization* (ISO) 14004, 2016). Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi seringkali memperhatikan dampak sosial untuk masyarakat sekitar. Perusahaan akan melakukan semakin banyak pengungkapan lingkungan jika kinerja lingkungan yang dilakukan semakin baik, hal ini berhubungan dengan upaya meningkatkan citra baik perusahaan di masyarakat yang diperoleh melalui pengungkapan (Suhardi dan Purwanto, 2015). Namun hasil penelitian Cahya (2016) menyatakan bahwa pengungkapan dari emisi karbon tidak dipengaruhi oleh kinerja lingkungan yang dilakukan pelaku bisnis. Hal ini dikarenakan pelaku bisnis cenderung menginformasikan prestasi dan kinerja keuangan kepada *stakeholder*, dibanding mengungkapkan emisi karbon.

Faktor kedua adalah profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan diukur dari laba yang diperoleh untuk periode tertentu (Munawir, 2014:33). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menandakan kinerja yang dimiliki semakin baik. Profitabilitas yang tinggi ini cenderung mendorong perusahaan untuk banyak melakukan pengungkapan dalam upaya menarik *stakeholder*. Semakin tinggi

profitabilitas yang dimiliki perusahaan akan mempermudah pengungkapan karena dana yang dimiliki mampu mencukupi upaya pengurangan emisi karbon dan aktivitas pengungkapan (Suhardi dan Purwanto, 2015), termasuk pengungkapan emisi karbon. Pemahaman ini sesuai dengan hasil penelitian Pradini (2013) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang kinerja keuangannya lebih baik maka semakin giat melakukan upaya pengurangan emisi yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan sehingga pengungkapan emisi karbon semakin banyak dilakukan.

Faktor ketiga adalah *media exposure* yaitu bagaimana dan seberapa banyak aktivitas perusahaan disorot oleh media. Sorotan media berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap perusahaan. Media juga secara tidak langsung berperan dalam mengendalikan aktivitas perusahaan mengenai lingkungan. Perusahaan yang sering mendapat pemberitaan negatif mengenai lingkungan akan menyebabkan diperolehnya pandangan negatif di masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk mengecam perusahaan dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya. Maka dari itu, sorotan media yang lebih tinggi akan mendorong perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan sehubungan dengan upaya membangun citra positif di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* (Linggasari, 2015). Berbeda dengan hasil studi dari Cahya (2016) yang menyatakan bahwa pengungkapan emisi karbon tidak dipengaruhi oleh sorotan media, karena apabila sorotan media tinggi maka perusahaan cenderung merasa khawatir berlebihan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

Faktor keempat adalah kepemilikan institusional yaitu tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi diantaranya institusi pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, perusahaan asuransi, dan kepemilikan institusi lain (Amelia dan Yadnyana, 2016). Sumber daya yang dimiliki oleh institusi cenderung lebih besar sehingga sumber daya ini memungkinkan dilakukannya aktivitas pengawasan atas perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi berusaha mengungkapkan informasi lebih banyak kepada *stakeholder* karena adanya pengawasan dalam manajemen perusahaan yang berjalan lebih optimal. Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu alternatif perusahaan dalam

mengungkapkan informasi dan akan meningkatkan citra positif di masyarakat serta berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan (Hermawan, dkk., 2018).

Faktor kelima adalah tipe industri yang dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu industri intensif karbon dan industri non-intensif karbon. Pengelompokan industri ini mengacu pada GICS (*Global Industry Classification Standard*). Industri intensif karbon memberikan kontribusi emisi karbon lebih besar dan akan berpengaruh terhadap lingkungan. Sementara industri non-intensif karbon memberikan kontribusi emisi karbon lebih rendah dari pada industri intensif karbon. Perusahaan dengan kontribusi emisi karbon lebih besar cenderung melakukan pengungkapan emisi karbon karena pemerintah dan masyarakat akan menekan dan mengawasi aktivitas yang dilakukan perusahaan (Suhardi dan Purwanto, 2015).

Faktor keenam adalah *leverage* yaitu seberapa jauh sumber dana perusahaan berasal dari hutang atau ekuitas (Harahap, 2013:106). Jika sumber dana lebih banyak berasal dari hutang maka *leverage* perusahaan dapat dikatakan tinggi. Jika *leverage* tinggi maka perusahaan cenderung melakukan penghematan biaya karena biaya akan dialokasikan untuk membayar hutang beserta bunga. Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mengakibatkan kekhawatiran bagi para *stakeholder* karena hal ini dianggap berisiko. Perusahaan dengan tingkat *leverage* lebih tinggi maka cenderung melakukan upaya dalam menghemat biaya, salah satunya adalah dengan melakukan pengungkapan emisi karbon yang semakin rendah (Suhardi dan Purwanto, 2015).

Faktor ketujuh adalah ukuran perusahaan yaitu perbandingan besaran perusahaan dinilai berdasarkan aset, penjualan, atau ekuitas yang dibandingkan dengan perusahaan sejenis (Linggasari, 2015). Ukuran perusahaan yang besar mengindikasikan sumber daya yang dimiliki semakin banyak. Sumber daya ini mampu dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya untuk pengungkapan emisi karbon sehubungan dengan upaya menarik perhatian *stakeholder*. Perusahaan besar melakukan pengungkapan informasi semakin banyak, termasuk pengungkapan mengenai emisi karbon karena tersedia sumber daya untuk melakukan pengungkapan (Hermawan, dkk., 2018). Tetapi hasil penelitian Cahya (2016) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon dikarenakan

perusahaan besar cenderung menganggap pengungkapan tidak menimbulkan dampak positif bagi perusahaan di masa mendatang.

Faktor kedelapan adalah kualitas audit yaitu karakteristik, gambaran praktik dan hasil audit ditinjau dari standar sebagai acuan dalam melakukan audit dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit mewujudkan bagaimana auditor menemukan kesalahan dalam batas wajar. Auditor dapat dikatakan mempunyai kualitas yang baik jika dalam aktivitas auditnya cenderung mensyaratkan pengungkapan informasi yang semakin banyak dan lengkap. Perusahaan melakukan pengungkapan informasi lebih lengkap dengan tujuan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga biaya yang digunakan dalam rangka perikatan awal dapat dimanfaatkan secara optimal (Watts dan Zimmerman, 1990). Opini yang dikeluarkan auditor dianggap penting oleh perusahaan karena hal ini berarti bahwa laporan keuangan yang diaudit mengungkapkan informasi lebih berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas akan membangun citra positif di masyarakat, terlebih jika opini tersebut diperoleh dari Kantor Akuntan berkualitas (Titman dan Trueman, 1986). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) besar cenderung menyampaikan informasi lebih banyak kepada auditor sehingga pengungkapan yang dilakukan semakin lengkap (Craswell dan Taylor, 1992). Hal ini disebabkan karena KAP besar mempunyai banyak klien dan pengalaman sehingga cenderung lebih mudah dalam menemukan ketidakwajaran pengungkapan.

Penelitian ini menggunakan objek yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Perusahaan manufaktur dipilih dengan pertimbangan aktivitas usahanya yang memberikan kontribusi emisi karbon lebih tinggi dibanding dengan sektor lain (Industri diharapkan Ramah Lingkungan, 2013). Dipilih periode 2016-2018 untuk penelitian ini karena di tahun 2016 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), selain itu tahun yang digunakan adalah paling baru mengingat agar informasi yang dihasilkan relevan dengan kondisi saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka perumusan masalah yaitu: “Apakah kinerja lingkungan, profitabilitas, *media exposure*, kepemilikan institusional, tipe industri, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan, profitabilitas, *media exposure*, kepemilikan institusional, tipe industri, *leverage*, ukuran perusahaan, serta kualitas audit terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik:

Sebagai acuan yang digunakan oleh penelitian selanjutnya dengan topik serupa dengan penelitian saat ini, yaitu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.

2. Manfaat praktis:

- a. Sebagai acuan untuk pembuat keputusan yaitu investor dalam memilih alternatif investasi dengan mempertimbangkan faktor pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon dianggap lebih menguntungkan jika dijadikan alternatif investasi karena cenderung dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. maka dari itu investor diharapkan berinvestasi pada perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon lebih lengkap.

- b. Sebagai acuan untuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) terkait pembaharuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 agar mempertimbangkan pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu pengungkapan wajib di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi terbagi atas 5 (lima) bab dan sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori meliputi teori *stakeholder*, emisi karbon, pengungkapan emisi karbon, kinerja lingkungan, profitabilitas, *media exposure*, kepemilikan institusional, tipe industri, *leverage*, dan ukuran perusahaan; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; serta model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; serta analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran baik akademik maupun praktis.